

(Tulisan Ke-1)

“Assalamualaikum P. Rektor. Barusan sy ditelpon oleh P. Anang Sudrajat, tim visitasi kedokteran ristek dikti, bhw Bapak Rektor diminta menghadiri undangan dr Menristek Dikti pada Selasa 29 Maret 2016 jam 15.30 –selesai. Undangan resmi dan detail acara masih sy komunikasikan. Terimakasih”,

begitulah bunyi pesan singkat (SMS) yang masuk ke *handphone* saya Senin, 28 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WIB dari salah seorang staf, yang saya tulis ulang persis aslinya. Usai membaca pesan tersebut, saya langsung menghubungi pengirim SMS untuk menanyakan kebenarannya. Setelah diyakinkan bahwa pesan itu benar, saya segera memesan tiket pesawat untuk terbang ke Jakarta sore itu juga. Alhamdulillah saya tidak menemui kendala sama sekali untuk urusan tiket. Saya berangkat ke Jakarta melalui Bandar Udara Abdul Rahman Saleh Malang dengan pesawat Batik Air yang mendarat di bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

Secara kebetulan Selasa pagi, tanggal 29 Maret 2016, saya harus ada di Jakarta untuk menghadiri undangan seminar Menhankam membahas kurikulum tentang konsep Bela Negara dan Cinta Tanah Air. Sebab, dirasakan di tengah-tengah arus globalisasi yang sedemikian deras semakin hari rasa cinta Tanah Air dan Bela Negara warga bangsa, terutama generasi muda semakin luntur. Agar tidak terlambat mengikuti acara Seminar dimulai pukul 09.00, saya memilih waktu Senin sore untuk berangkat, sehingga Senin malam saya sudah berada di Jakarta. Maklum dengan institusi militer, saya harus tepat waktu. Sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, saya harus menunjukkan komitmen saya terkait masalah cinta Tanah Air dan Bela Negara.

Dalam perjalanan, saya sempat berpikir apa agenda utama Kemenristek dikti mengundang saya. Sebab, di undangan yang hanya melalui SMS itu tidak dicantumkan apa agendanya, kecuali jam dan tempat pertemuan. Tetapi dalam batin saya menduga undangan tersebut

terkait pengajuan Program Studi Kedokteran yang telah divisitasi oleh Tim Kemenristek dikti Desember tahun lalu. Sebab, saat ini tidak ada hal-hal lain terkait dengan Kementerian Ristek dikti selain urusan Surat Keputusan Ijin Pendirian Program Studi Kedokteran.

Tepat pukul 8.40 saya sudah tiba di aula Kemenhankam dan mengikuti registrasi untuk peserta seminar. Tepat pukul 9.00 seminar dimulai dan dibuka langsung oleh Menhankam, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu. Ketika seminar baru berlangsung beberapa saat, saya menerima pesan singkat (SMS) dari salah seorang staf Kemenristek dikti agar saya hadir pukul 14.00 WIB, bahkan diminta mengajak minimal 3 orang dan maksimal 5 orang staf. Saya agak bingung karena di undangan tidak tercantum harus mengajak staf. Secara kebetulan hari itu ada Wakil Rektor 3 yang ikut seminar bersama saya dan Wakil Rektor 2 dan Kahumas yang ada urusan di Kemenag bersama seorang staf yang selama ini mengurus proposal Kedokteran. Ketiganya saya minta untuk mendampingi saya sesuai permintaan Kemenristek dikti. Walhasil, walau terlambat datang semua bisa hadir di Kemenristek dikti, sehingga saya didampingi oleh 4 kawan.

Agar datang tepat waktu, maka usai seminar yang berakhir pukul 12.00 saya segera meninggalkan gedung Kemenhankam menuju gedung Kemenristek dikti dengan menyewa taksi. Dalam perjalanan menuju Kemenristek dikti, saya dihubungi oleh salah seorang rektor PTS yang juga memperoleh undangan yang sama menanyakan posisi saya di mana. Sebab, semua Rektor sudah hadir, kecuali saya. Saya pun semakin panik. Saya tidak terbiasa terlambat menghadiri undangan. Apalagi undangan dari Kementerian yang saya anggap pasti penting terkait dengan pengembangan kelembagaan Universitas yang saya pimpin.

Kepanikan saya bertambah karena sopir taksi yang saya tumpangi itu tidak begitu memahami seluk beluk lalu lintas Jakarta pada jam-jam sibuk seperti itu. Bahkan dia tidak paham tempat yang saya tuju itu, walaupun ketika akan naik saya tanya apakah tahu tempat tersebut, dia mengatakan iya. Ternyata sopir taksi baru saja bergabung dengan perusahaan taksi terbesar di Indonesia itu. Saya pun semakin panik, karena jam sudah menunjukkan pukul 14.30. Dalam urusan waktu, saya termasuk disiplin, sehingga jika terlambat menghadiri acara apapun saya merasa tidak nyaman.

Melihat jalan Jakarta macet karena pada jam sibuk dan sopir tampak bingung tidak tahu mana arah yang tepat, saya minta taksi minggir dan minta diturunkan. Saya berpikir harus mencari kendaraan yang bisa menerobos kemacetan jalan Jakarta. Tidak ada pilihan lain kecuali sepeda motor alias ojek. Kepada pengendara ojek saya sampaikan tempat yang saya tuju. Alhamdulillah dia tahu tempat tersebut, sehingga perjalanan menuju tempat rapat itu lancar.

Dalam suasana panik, saya sempat menghubungi teman Rektor yang mengontak saya tadi untuk menanyakan sebenarnya apa agenda pertemuan tersebut. Dia menjawab singkat “untuk menerima SK”. Saya bertanya SK apa? Dia menjawab balik “SK tentang Kedokteran”. Saya antara percaya atau tidak. Sebab, saya tahu persis betapa beratnya tarik menarik dari berbagai pihak terkait ijin pendirian kedokteran. Tetapi saya berdoa mudah-mudahan jawaban dari sejawat Rektor itu benar adanya.

Tepat pukul 14. 45 saya tiba di gedung Kementerian Ristek dikti dengan kondisi ngos-ngosan. Saya terlambat hampir 45 menit dari jadwal. Saya menuju staf resepsionis untuk menanyakan tempat pertemuan. Saya ditunjukkan bahwa pertemuan diadakan di lantai 3. Sesampai di sana, saya melihat banyak tamu yang telah hadir dan sudah duduk rapi di kursi masing-masing sambil menunggu acara dimulai. Beberapa Rektor menggoda saya dengan mengatakan “Gara-gara sampean belum datang, rapat belum dimulai”. Saya pun semakin penasaran sambil menahan rasa malu karena menjadi perhatian banyak orang.

Tidak lama kemudian, beberapa staf Kementerian masuk dan mengecek apa semua Rektor yang diundang berjumlah delapan orang telah hadir. Setelah semua dinyatakan lengkap, seorang staf memberi tahu akan ada gladi bersih untuk upacara penerimaan Surat Keputusan Menteri Ristek dikti tentang Ijin pendirian Program Studi Kedokteran. Mendengar pengumuman itu, tanpa terasa air mata saya meleleh dan jatuh ke lantai karena haru. Hari itu Selasa, 29 Maret 2016 Allah Tuhan YME menganugerahkan salah satu nikmatnya kepada keluarga besar Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang melalui saya selaku Rektor dengan memperoleh Surat Keputusan Pendirian Program Studi Kedokteran.

Tentu saja rasa suka cita dan syukur tidak bisa saya hindari. Berita itu segera saya sampaikan kepada semua warga kampus melalui WA bahwa sore itu kita akan menerima SK Pendirian Program Studi Kedokteran. Sejak saat itu HP saya terus berdering. Hanya dalam hitungan menit berita itu tersebar luas ke warga kampus, termasuk mereka yang saat ini sedang studi dan berada di luar negeri. Tepat pukul 15. 30 Menristek dikti, Mohamad Nasir memasuki ruang upacara. Usai menjabat tangan dengan semua Rektor yang diundang, Menristek dikti yang sore itu mengenakan baju batik duduk di deretan tengah depan didampingi semua pejabat eselon 1.

Sesaat kemudian, upacara penyerahan Surat Keputusan dimulai, diawali dengan laporan Dirjen Pengembangan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc. tentang kronologi keluarnya Surat Keputusan Menristek dikti No 126/KPT/I/2016 dan dilanjutkan dengan amanah Menteri Ristek dikti, Prof. Mohamad Nasir.

Dalam amanahnya Menristek dikti menyampaikan bahwa sebenarnya saat ini masih terdapat puluhan Program Studi Kedokteran di Indonesia di berbagai perguruan tinggi yang masih terakreditasi C dari 69 Program Studi yang ada, yang berarti mutunya masih rendah. Tetapi pada saat yang sama pemerintah menginginkan jumlah program studi kedokteran di Indonesia ditambah. Sebab, menurutnya berdasarkan data jumlah tenaga dokter di Indonesia masih sangat rendah dibanding dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Untuk itu, PT penerima SK Kedokteran yang baru tersebut harus sanggup memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang telah dituangkan dalam peraturan mengenai pendidikan kedokteran dalam waktu 6 bulan sejak perkuliahan dimulai. Jika tidak, maka PT akan diberi sanksi dan tidak tertutup kemungkinan SK yang telah diterima akan dicabut.

Usai mendengarkan arahan Menteri para Rektor dipanggil satu demi satu menuju meja yang telah disediakan untuk menandatangani Pakta Integritas di atas materai 6 ribu rupiah. Kelompok pertama 4 Rektor dari 8 PT penerima SK dipanggil lebih dulu. Pakta Integritas itu berisi poin-poin mengenai tanggung jawab yang harus diemban oleh Rektor selaku pimpinan Perguruan Tinggi untuk menjamin terjadi proses belajar mengajar yang baik, memenuhi kekurangan dosen dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai rekomendasi Tim Visitasi, serta kesiapan untuk diakreditasi 6 bulan setelah perkuliahan. Tak ketinggalan juga jumlah mahasiswa maksimal yang bisa diterima untuk tahun pertama, yaitu sebanyak 50 orang. Saya termasuk kelompok kedua yang dipanggil bersama, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ciputra Surabaya.

Usai menandatangani Pakta Integritas, tepat pukul 16.30 WIB Menteri menyerahkan Surat Keputusan kepada masing-masing Rektor. Tentu saja prosesi penerimaan Surat Keputusan itu diabadikan dengan baik oleh semua yang hadir dan anggota pendamping para Rektor. Wajah bahagia dan lega tampak terpancar pada semua yang hadir. Bahasa tubuh mereka mengatakan saat yang dinanti-nanti sekian lama itu akhirnya datang juga. Perasaan itu sangat wajar. Sebab, masing-masing PT telah menyiapkan pendirian Program Studi Kedokteran sudah lama. Malah, kabarnya satu di antara 8 PT penerima SK itu sudah menyiapkan pendirian Program Studi Kedokteran sejak 15 tahun lalu hingga 3 kali pergantian Rektor. Biaya yang dikeluarkan pun sudah tidak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, sangat wajar jika peristiwa itu tidak saja diabadikan, tetapi juga dimaknai sangat dalam bahwa perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun tidak sia-sia. (Bersambung).

---

Malang, 6 April 2016